



Pergantian OPD dan Pemeriksaan BPK

# Penyebab Molornya Kegiatan Fisik Dinas PUTRPK

Bangli (Bali Post) -

Sorotan Komisi III DPRD Bangli terkait kinerja pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPK) selama sembilan bulan terakhir, ditanggapi Kabid Bina Marga Dinas PUTRPK Putu Widagunawan. Dia mengatakan, kegiatan fisik di Dinas PUTRPK sejatinya sudah mulai dikerjakan sejak Januari. Hanya pengerjaannya sempat molor karena adanya pergantian OPD, bencana alam hingga pemeriksaan BPK.

Kepada *Bali Post*, Selasa (24/10) kemarin, Widagunawan mengatakan saat proses pengerjaan proyek terjadi pergantian OPD yang menyebabkan nama dinas berubah. Hal itu pun memerlukan waktu untuk penyesuaian. Kemudian pada Februari, kegiatan di Dinas PUTRPK juga terhambat akibat bencana alam di Kintamani. "Semua staf saat itu terfokus ke sana," ujarnya.

Setelah bencana berakhir, kegiatan kembali terhambat karena adanya pemeriksaan

BPK terkait aset. Atas petunjuk BPK yang disampaikan ke Inspektorat, Dinas PUTRPK diminta melengkapi sejumlah hal. Proses ini memakan waktu hingga tiga bulan lebih. "Sehingga setelah itu, di bulan Agustus baru kegiatan bisa berjalan," terangnya.

Terkait persentase realisasi kegiatan fisik yang 26 persen itu, Widagunawan mengatakan hal tersebut merupakan perhitungan menyeluruh di beberapa bidang di Dinas PUTRPK. Khusus

di Bidang Bina Marga, realisasi kegiatan fisik sudah mencapai 54,76 persen, sementara realisasi keuangannya 55,7 persen.

Widagunawan juga menjelaskan kegiatan yang bersumber dari DAK selama ini sudah dikerjakan. Sesuai ketentuan, pelaporan realisasi untuk pengamprahan sudah dilakukan 21 Oktober lalu, sehingga dipastikan pengamprahan tidak hangus. "DAK itu kami bisa selesaikan sampai menjelang akhir tahun 2017," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Bangli mempertanyakan kinerja pejabat Dinas PUTRPK. Pasalnya, hingga memasuki pertengahan Oktober, realisasi kegiatan fisik di dinas tersebut masih sangat rendah yakni baru mencapai 26 persen.

Anggota Komisi III DPRD Bangli Made Sudiasa saat ditemui usai menggelar rapat kerja dengan Dinas PUTRPK, Senin (23/10), mengungkapkan semestinya dalam jangka waktu sembilan bulan yakni dari Januari hingga September, kegiatan fisik yang didanai DAK sudah tuntas dilaksanakan. Akan tetapi kenyataannya, realisasi kegiatan fisik yang ditangani dinas tersebut hanya 26 persen. Tak hanya

itu, realisasi keuangannya juga sangat minim yakni hanya 19 persen.

Sudiasa mengungkapkan, dalam rapat kerja yang digelar sebelumnya, pihak Dinas PUTRPK selalu menjanjikan kegiatan fisik segera dilaksanakan. Bahkan sempat dijanjikan kegiatan berjalan pada Agustus. "Tapi nyatanya, sekarang realisasinya baru 26 persen," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Ketut Suastika mengatakan, sesuai ketentuan, untuk mengamprah DAK yang kedua, harusnya realisasi kegiatan sudah tuntas 21 Oktober lalu. Dia pun meminta Bupati memberikan penilaian khusus pada pejabat di Dinas PUTRPK jika terus-terusan seperti ini. (kmb40)

Edisi : Rabu, 25 Oktober 2017

Hal : 10